

Collaborative Governance sebagai Strategi Inovatif dalam Mengatasi Stunting di Kabupaten Flores Timur

Collaborative Governance as an Innovative Strategy in Overcoming Stunting in East Flores District

Siti Noor Khatija Ibrahim*, Jeronimo Da Cruz Neno Leus, Maya Puspita Dewi

Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta,
Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Cirendeui, Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten 15419
Email: siti.noorkhatija@student.umj.ac.id

Tanggal submisi: 9 Januari 2024; Tanggal penerimaan: 24 Juni 2024

ABSTRAK

Meskipun telah dilakukan berbagai program intervensi untuk mengatasi *stunting* di Kabupaten Flores Timur, angka prevalensi *stunting* masih belum mencapai target 10% pada tahun 2023. Salah satu tantangan adalah kurang keterlibatan masyarakat dan sektor swasta dalam penanganan *stunting*. Padahal, intervensi *stunting* tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga memerlukan kolaborasi lintas sektor untuk bersinergi dalam optimalisasi program. Penelitian ini membahas tentang *collaborative governance* sebagai strategi inovatif dalam mengatasi *stunting* di Kabupaten Flores Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Lima Tenaga Kesehatan dan dua Kader Pembangunan Masyarakat menjadi informan penelitian yang dipilih secara purposive. Analisis data menggunakan model interaktif Miles B. Huberman. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan penerapan *collaborative governance* dengan model *penta helix* yakni pemerintah, pengusaha, akademisi, masyarakat madani, dan media massa menjadi solusi inovatif yang dapat diterapkan dalam mengatasi *stunting*. Kelima pemangku kepentingan utama dalam model *collaborative governance penta helix* dapat bekerja sama secara sinergis guna mencapai hasil yang optimal dalam mengatasi permasalahan *stunting*.

Kata Kunci: *tata kelola kolaboratif; penta helix; stunting*

ABSTRACT

Despite various intervention programs to address stunting in East Flores Regency, the stunting prevalence rate has not yet reached the target of 10% by 2023. One of the challenges is the lack of community and private sector involvement in handling stunting. Stunting intervention is not only the responsibility of the government but also requires cross-sector collaboration to work together in optimizing the program. This research discusses collaborative governance as an innovative strategy for overcoming stunting in East Flores Regency. The research method used was qualitative with a descriptive approach. Five health workers and two community development cadres became research informants who were selected purposively. Data analysis used the interactive model of Miles B. Huberman. Data validity was strengthened through triangulation. The results showed that the application of collaborative governance with the penta helix model, namely government, entrepreneurs, academics, civil society, and mass media, is an innovative solution that can be applied to overcoming stunting. The five main stakeholders in the penta helix collaborative governance model can work together synergistically to achieve optimal results in overcoming stunting problems.

Keywords: *collaborative governance; penta helix; stunting*

PENDAHULUAN

Stunting atau sering disebut kerdil, adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (Balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) ⁽¹⁾. Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2018, prevalensi *stunting* pada anak di bawah dua tahun adalah 29,9% pada tahun 2018, yang juga

mengalami penurunan dari sebelumnya 32,8% pada tahun 2013. Prevalensi Balita *stunting* turun dari 37,2% pada tahun 2013 menjadi 30,8% pada tahun 2018 ⁽²⁾. Meskipun terdapat tren penurunan, prevalensi *stunting* di Indonesia masih cukup tinggi. Hasil Survei Kesehatan Indonesia pada tahun 2023 menunjukkan prevalensi *stunting* sebesar 21,5% ⁽³⁾.

Penerapan asupan nutrisi yang menyeluruh dan beragam selama periode 1000 hari pertama kehidupan dapat mendukung perkembangan otak, meningkatkan pertumbuhan yang seimbang, serta mengurangi risiko penyakit.⁽¹⁻³⁾ Sebaliknya, ketidakmampuan memenuhi kebutuhan gizi selama 1000 hari pertama kehidupan dapat menyebabkan masalah pertumbuhan yang bersifat permanen, termasuk *stunting*.^(4,5) *Stunting*, sebagai gangguan pertumbuhan dan perkembangan akibat kekurangan gizi kronis, menjadi persoalan yang kompleks. Dampaknya tidak hanya terbatas pada kesehatan dan pertumbuhan fisik melainkan juga berdampak pada perkembangan kognitif, yang pada akhirnya memengaruhi kualitas sumber daya manusia.^(6,7)

Berdasarkan survey *Levels and Trends in Child Malnutrition* oleh UNICEF, WHO, dan World Bank Group, prevalensi *stunting* global mencapai 22,3% pada tahun 2022, atau sekitar 148,1 juta anak usia 0–60 bulan mengalami *stunting*.⁽⁸⁾ Pada tahun 2022, angka prevalensi *stunting* di Indonesia mencapai 21,6%, dengan tingkat prevalensi *stunting* tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mencapai 35,3%.⁽⁹⁾

Tingginya jumlah kasus *stunting* di Indonesia menunjukkan bahwa persoalan *stunting* menjadi isu penting yang harus mendapat perhatian khusus dari berbagai pihak. Seperti halnya Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang telah mengambil langkah serius dengan menetapkan *stunting* sebagai prioritas pembangunan daerah, dan mengeluarkan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 46 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*. Upaya percepatan tersebut melibatkan berbagai kegiatan, seperti konvergensi *stunting*, rembuk *stunting*, dan program inovatif Gerobak Cinta dengan konsep pemberian makanan tambahan berbasis sumber daya lokal yang disebut Solor, yakni Sorgum dan Kelor. Selain itu, dalam usaha untuk menurunkan tingkat *stunting* menuju target 10% pada tahun 2023 dan mencapai status bebas *stunting* pada tahun 2024, Kabupaten Flores Timur mengembangkan inovasi kolaboratif bernama Go Cinta 2H2. Inovasi ini menggabungkan konsep Gerobak Cinta dan 2H2 Center.⁽¹⁰⁾

Berbagai program intervensi untuk mengatasi *stunting* di Kabupaten Flores Timur telah dilakukan, namun faktanya angka prevalensi *stunting* belum mencapai target yang diharapkan yakni 10% *stunting* di tahun 2023. Berikut ini tabel terkait prevalensi *stunting* di Kabupaten Flores Timur.

Tabel 1. Prevalensi *Stunting* Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 s.d Agustus 2023

Tahun	Total Balita <i>Stunting</i>	Persentase <i>Stunting</i>
2019	4.999	31,07%
2020	3.974	22,70%
2021	3.696	20,90%
2022	3.636	20,04%
Agustus 2023	3.184	18.01%

Sumber: ⁽¹¹⁾

Tabel di atas menunjukkan bahwa angka prevalensi *stunting* di Kabupaten Flores Timur terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Meskipun terjadi penurunan yang signifikan, angka *stunting* di Flores Timur masih tetap relatif tinggi. Selain itu, data yang diperoleh dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Flores Timur, menunjukkan bahwa kecamatan dengan jumlah *stunting* terbanyak yakni mencapai 253 balita *stunting*.⁽¹²⁾

Sejumlah penelitian yang berkaitan dengan penanggulangan *stunting* di Kabupaten Flores Timur, telah banyak dilakukan. Beberapa temuan penelitian menunjukkan adanya kendala-kendala dalam upaya pencegahan *stunting* di Kabupaten Flores Timur, seperti keterbatasan sumber daya manusia, partisipasi masyarakat yang minim, keterbatasan ketersediaan bahan pangan, dan rendahnya pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun masyarakat secara umum tentang *stunting*. Selain itu, fungsi dan pelaksanaan konvergensi di tingkat pemerintah daerah hingga desa/kelurahan bersama lintas stakeholder belum berjalan dengan optimal.⁽¹³⁻¹⁶⁾

Hasil penelitian di atas sejalan dengan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti di Kabupaten Flores Timur. Data menunjukkan bahwa tantangan intervensi *stunting* di beberapa Desa Kecamatan Solor Timur, salah satu faktornya kurang keterlibatan

masyarakat dan sektor swasta dalam penanganan *stunting*.⁽¹⁷⁾ Padahal, Intervensi *stunting* tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga memerlukan kolaborasi lintas sektor untuk bersinergi dalam optimalisasi program. Sebagaimana Astuti menjelaskan bahwa dalam menyelesaikan masalah yang kompleks diperlukan partisipasi berbagai pihak yang terlibat.⁽¹⁸⁾

Dalam dua dekade terakhir, muncul strategi baru dalam tata kelola pemerintahan yang dikenal sebagai *collaborative governance*. Ini merupakan pendekatan inovatif dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, di mana pemerintah bekerja sama dengan para pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta dalam pengambilan keputusan.⁽¹⁹⁾ Meskipun otoritas tertinggi tetap berada di tangan pemerintah, tanggung jawab yang sama terhadap hasil kebijakan diemban oleh semua pihak terlibat, karena kolaborasi bertujuan mencapai kesepakatan di antara pemangku kepentingan.⁽¹⁹⁾

Collaborative governance, sebagai model strategi dalam merumuskan dan menyetujui kebijakan tidak hanya mengandalkan kerjasama, tetapi juga memberdayakan setiap pemangku kepentingan, dengan prinsip dasar bahwa kekuasaan dan tanggung jawab harus didistribusikan secara adil di antara semua pihak yang terlibat.⁽²⁰⁾ Dalam esensinya, *collaborative governance* menciptakan suatu proses di mana penetapan, pengarahan, fasilitasi, dan pengawasan rencana organisasi sektoral menjadi kunci dalam menangani permasalahan kebijakan publik yang kompleks dan tidak dapat diselesaikan oleh satu organisasi saja. Pendekatan ini mengedepankan distribusi kekuasaan secara merata untuk mencapai kesepakatan yang melibatkan semua pemangku kepentingan.⁽¹⁹⁾

Oleh karena itu, penerapan *collaborative governance* menjadi krusial dalam mengatasi isu *stunting*, terutama karena memberikan pendekatan komprehensif melalui keterlibatan lintas aktor. Penelitian tentang peran *collaborative governance* dalam mengatasi *stunting* di Kabupaten Flores Timur menjadi sangat relevan dan penting, mengingat potensinya sebagai solusi inovatif untuk mewujudkan upaya pencegahan dan penanggulangan *stunting*. Tujuan penelitian ini adalah menyajikan gambaran

komprehensif tentang penerapan *collaborative governance* sebagai strategi inovatif dalam mengatasi *stunting* di Kabupaten Flores Timur.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, fokus pada penerapan *collaborative governance* sebagai strategi inovatif dalam mengatasi *stunting* di Kabupaten Flores Timur. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data sekunder yang diperoleh dari literatur seperti buku dan artikel ilmiah lainnya yang mendukung topik penelitian dengan kluster penelusuran literatur ilmiah seperti *collaborative governance* dan strategi intervensi *stunting*. Data sekunder ini digunakan untuk membangun kerangka konseptual, menyusun analisis literatur, dan mendalami pemahaman mengenai topik penelitian. Penelitian melibatkan lima (5) Tenaga Kesehatan dan Dua (2) Kader Pembangunan Masyarakat sebagai informan yang dipilih secara purposive. Analisis data menggunakan model interaktif Miles B. Huberman, melibatkan tahapan *Data Reduction*, *Data Display*, dan *Conclusion Drawing/Verification*.⁽²¹⁾ Proses analisis dimulai dengan reduksi data dari berbagai sumber data, diikuti oleh penyajian data secara jelas untuk menyusun kesimpulan terkait *collaborative governance* sebagai strategi inovatif dalam mengatasi *stunting*. Keabsahan data diperkuat dengan teknik triangulasi, termasuk triangulasi sumber, teknik, dan waktu, untuk memastikan akurasi dan kredibilitas data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Tantangan Intervensi *Stunting* di Kabupaten Flores Timur

Upaya pencegahan *stunting* menjadi isu hangat di bidang kesehatan, khususnya di negara-negara berkembang. Banyak langkah telah diambil untuk meningkatkan gizi pada anak dan keluarga di Kabupaten Flores Timur. Penanggulangan masalah *stunting* di Kabupaten Flores Timur melibatkan dua jenis intervensi, yaitu Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif. Intervensi spesifik merupakan tindakan khusus yang direncanakan untuk kelompok 1.000 HPK

dan dijalankan oleh dinas kesehatan, sementara intervensi sensitif melibatkan kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan, mengedepankan pendekatan konvergensi antar perangkat daerah.

Pencegahan *stunting* dimulai sejak janin dalam kandungan dengan memastikan pemenuhan kebutuhan zat gizi bagi ibu hamil. Hal ini melibatkan asupan makanan yang cukup gizi, suplementasi zat gizi (tablet Fe), dan pemantauan kesehatan ibu hamil. Selain itu, praktik pemberian ASI eksklusif pada bayi hingga usia 6 bulan dan pemberian Makanan Pendamping ASI (MPASI) setelah usia 6 bulan menjadi bagian integral dari upaya pencegahan *stunting*. Pentingnya peran ibu nifas dalam mendapatkan makanan bergizi dan suplementasi zat gizi, seperti kapsul vitamin A, juga tidak dapat diabaikan. Monitoring pertumbuhan balita secara rutin dan tepat waktu menjadi kunci untuk mencegah *stunting* yang bersifat kronis.

Kabupaten Flores Timur memiliki komitmen bersama untuk mengatasi *stunting* dengan mendeklarasikan "Gempur *Stunting*" berdasarkan visi bupati yang menitikberatkan pada penyelamatan tanaman dan generasi muda Flores Timur. Setelah deklarasi, pemerintah daerah melalui dinas kesehatan meluncurkan program inovatif "Gerobak Cinta", memberikan makanan tambahan selama 90 hari kepada anak-anak *stunting* pada bulan Mei-Juli, dengan pengukuran hasil pada bulan Agustus. Pendanaan awal program ini berasal dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan kemudian menggunakan dana desa dengan memanfaatkan potensi tanaman lokal. Hingga tahun 2023, Kabupaten Flores Timur berhasil mencatat penurunan yang signifikan dalam angka *stunting*. Program Gerobak Cinta, dengan fokus pada PMT Terfokus Gerobak Cinta, menjadi inovasi kunci dalam upaya pencegahan *stunting*. Pendekatan konvergensi dan keterlibatan tanaman lokal makanan 4 bintang yakni sorgum, kelor, ikan, dan telur puyuh memberikan dampak positif yang besar dalam mengurangi *stunting*.

Pada fase pelaksanaan program Gerobak Cinta, tenaga pengolah gizi di puskesmas akan menyerahkan menu masakan, sementara desa akan menyerahkan dana PMT Terfokus Gerobak Cinta kepada Ketua Penggerak PKK desa

bersama kader posyandu sesuai jumlah sasaran di Desa. Kemudian, kwitansi penyerahan dana akan ditandatangani dan dibawa oleh petugas desa untuk pertanggungjawaban. Tim Penggerak PKK desa, bersama kader posyandu, akan membeli bahan makanan sesuai jumlah dan usia sasaran, dengan pembatasan membeli di luar desa kecuali jika tidak tersedia di desa. Semua sasaran akan berkumpul bersama orangtua (ibu dan ayah) atau suami bagi ibu hamil untuk dilakukan kampanye 1000 HPK, agar sasaran memahami maksud dan tujuan dari program PMT Terfokus Gerobak Cinta. PKK dan kader posyandu berperan sebagai pendamping dan pengarah, sedangkan orangtua sasaran bertindak sebagai juru masak untuk melanjutkan pola masak dan pola makan di rumah. Sambil menunggu orang tua memasak, anak-anak akan dibimbing oleh tenaga pendamping KB Desa dalam permainan stimulasi tumbuh kembang anak.

Meskipun demikian, kebijakan pemerintah tidak selalu berjalan lancar. Proses pelaksanaan dihadapkan pada berbagai tantangan. Beberapa tantangan tersebut diantaranya:

1. Keterbatasan Keragaman Bahan Pangan
Tantangan intervensi *stunting* melibatkan berbagai faktor, termasuk keterbatasan akses terhadap bahan pangan yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Sorgum dan telur puyuh, sebagai salah satu contoh bahan pangan utama yang dapat menjadi bagian dari strategi intervensi untuk mengatasi *stunting* di Kabupaten Flores Timur. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa salah satu kendala intervensi *stunting* program PMT Gerobak Cinta adalah keterbatasan bahan pangan, terutama sorgum dan telur puyuh, yang menjadi tidak mungkin diakses oleh masyarakat karena jarak yang jauh. Ibu kader posyandu serta masyarakat harus pergi ke desa yang jauh untuk mendapatkan sorgum, bahan utama dalam PMT Terfokus Gerobak Cinta. Hal ini dikarenakan, sorgum dan telur puyuh tidak selalu mudah didapatkan atau tersedia di semua wilayah di Kabupaten Flores Timur. Infrastruktur transportasi dan distribusi yang kurang baik menjadi tantangan tersendiri sehingga menyulitkan

pendistribusian bahan pangan tersebut ke daerah - daerah yang membutuhkannya.

2. Rendahnya Pemahaman Masyarakat Tentang *Stunting*

Rendahnya pemahaman masyarakat tentang *stunting* dan sikap acuh terhadap dampak *stunting* dapat memiliki berbagai dampak negatif, baik pada tingkat individual maupun pada tingkat masyarakat secara keseluruhan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih banyak orangtua yang belum memiliki pemahaman kuat tentang *stunting* dan dampaknya. Banyak orangtua yang cenderung menganggap bahwa anak-anak mereka dalam keadaan sehat dan aktif, sehingga menolak jika hasil pengukuran bayi atau balita dikategorikan sebagai *stunting*. Dampak dari rendahnya pemahaman dan sikap acuh terhadap *stunting* dapat mencakup kurangnya kesadaran akan pentingnya pola makan yang sehat dan bergizi, serta kurangnya tindakan preventif, seperti pemberian nutrisi yang optimal selama masa kehamilan dan pada periode pertumbuhan awal anak, yang sejatinya dapat mengurangi risiko terjadinya *stunting*. Selain itu, banyak orangtua yang memiliki anak *stunting* menghadapi tekanan sosial dan emosional karena stigmatisasi dan diskriminasi di tengah masyarakat tentang *stunting*. Akibatnya, tidak jarang orangtua dari anak yang mengalami *stunting* menolak untuk menerima program intervensi *stunting* seperti Pemberian Makanan Tambahan (PMT). Oleh karena itu, pemahaman yang lebih baik tentang *stunting*, dukungan sosial, dan pendekatan yang bersifat inklusif perlu ditingkatkan agar orangtua dapat merespons dengan lebih efektif terhadap kondisi kesehatan anak.

3. Minimnya Partisipasi Pemangku Kepentingan

Kurangnya keterlibatan pemangku kepentingan merupakan tantangan serius dalam upaya intervensi *stunting*. Pemangku kepentingan merupakan kelompok atau individu yang memiliki kepentingan, pengaruh, atau dampak terhadap masalah *stunting*. Beberapa pemangku kepentingan mungkin tidak sepenuhnya memahami urgensi masalah *stunting* dan dampaknya terhadap

perkembangan anak-anak. Ketidakhahaman ini dapat mengurangi motivasi untuk terlibat dalam upaya pencegahan dan penanganan *stunting*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ditemukan pemimpin masyarakat seperti tokoh agama, tokoh adat hingga BPD belum sepenuhnya mendukung atau tidak terlibat dalam upaya intervensi *stunting*, hal ini kemudian dapat menghambat partisipasi dan dukungan dari masyarakat umum.

4. Keterbatasan Sarana Prasarana dan SDM Implementasi kebijakan pencegahan *stunting* di daerah tergantung pada faktor pendukung, termasuk fasilitas penunjang. Meskipun fasilitas kesehatan seperti polindes, posyandu, poskesdes, dan puskesmas sudah ada, masalah muncul terkait fasilitas penunjang lainnya, seperti sulitnya akses jalan ke desa-desa terpencil, sanitasi masyarakat yang tidak layak dan beberapa desa masih sulit mendapatkan akses air yang bersih.

Collaborative Governance sebagai Strategi Inovatif dalam Mengatasi *Stunting* Di Kabupaten Flores Timur

Konsep kerja sama atau kolaborasi dalam kajian Administrasi Publik, dikenal dengan istilah *collaborative governance*. Ansel dan Gash dalam artikel *Collaborative Governance in Theory and Practice* menjelaskan bahwa istilah *collaborative governance* merujuk pada suatu pendekatan tata kelola pemerintahan yang terlibat secara langsung dengan para pemangku kepentingan di luar struktur pemerintah atau negara yang menekankan pada pencapaian kesepakatan dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan bersama, dengan tujuan untuk merumuskan atau melaksanakan kebijakan publik dan program-program masyarakat.⁽¹⁹⁾ Pendekatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, sektor swasta dan organisasi non-pemerintah dalam pengambilan keputusan, perencanaan dan implementasi program-program pelayanan publik. Mengharuskan seluruh pemangku kepentingan terlibat dalam dialog, dimana para pemangku kepentingan ini mewakili diri mereka sendiri dalam mengungkapkan kepentingannya.⁽²²⁾

Terdapat beberapa model *collaborative governance* yang melibatkan peran stakeholder yakni: pertama model kolaborasi *Triple Helix*, terdiri dari tiga aktor meliputi pemerintah, pengusaha dan akademisi; kedua, model kolaborasi *Quadra Helix*, terdiri dari empat aktor meliputi pemerintah, pengusaha, akademisi dan masyarakat madani; ketiga, model kolaborasi *Penta Helix* merupakan pengembangan dari dua model sebelumnya yang disempurnakan menjadi lima pemangku kepentingan, terdiri dari pemerintah (*government*), pengusaha (*business*), akademisi (*academician*), masyarakat madani (*civil society*) dan media massa (*mass media*).⁽²³⁻²⁸⁾

Dalam penelitian ini, *collaborative governance* atau tata kelola kolaboratif, muncul sebagai strategi inovatif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mengatasi permasalahan *stunting* di Kabupaten Flores Timur. *Stunting* merupakan kondisi ketidakcukupan gizi yang menyebabkan pertumbuhan fisik dan perkembangan anak terhambat. Dalam konteks ini, *collaborative governance* menjadi pendekatan yang efektif karena melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak *stakeholder*. Penelitian ini akan menganalisis peran stakeholder dari model *collaborative governance penta helix*.

Pemerintah (Government)

Pemerintah memiliki peran krusial yang berpusat dalam beberapa aspek, yaitu pengembangan infrastruktur pengetahuan, kebijakan inovasi publik, serta dukungan untuk jaringan inovasi dan kemitraan antara sektor publik dan swasta.⁽²⁷⁾ Artinya pemerintah memiliki peran sentral dalam pembangunan dan pengembangan melalui beberapa aspek kunci. Pertama, melalui pengembangan infrastruktur, pemerintah bertanggung jawab untuk membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah dapat memainkan peran penting dalam mengatasi *stunting* dengan mengembangkan infrastruktur kesehatan dan pola asuh yang baik. Hal ini dapat mencakup pendidikan kesehatan untuk ibu hamil, penyuluhan gizi, dan akses yang mudah terhadap layanan kesehatan yang berkualitas.

Kedua, kebijakan inovasi publik menunjukkan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan yang mendorong inovasi di berbagai sektor, baik itu dalam bidang teknologi, ekonomi, maupun sosial. Kebijakan ini dapat mencakup insentif, regulasi, atau dukungan lainnya yang merangsang perkembangan inovasi. Penerapan kebijakan inovasi publik dapat membantu menciptakan solusi baru untuk mengatasi *stunting*. Pemerintah Kabupaten Flores Timur telah mengambil langkah konkret dengan menetapkan *stunting* sebagai prioritas pembangunan daerah. Dalam Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 46 Tahun 2022, pemerintah mengusung kebijakan percepatan penurunan *stunting* melalui langkah-langkah seperti konvergensi *stunting*, rembuk *stunting*, dan program inovatif PMT Gerobak Cinta. PMT Gerobak Cinta menciptakan solusi inovatif dengan memberikan makanan tambahan berbasis sumber daya lokal, seperti Sorgum dan Kelor. Penerapan kebijakan ini perlu melibatkan insentif, dukungan penelitian, dan regulasi yang mendukung pengembangan produk bahan pangan atau program inovatif di sektor kesehatan dan nutrisi.

Ketiga, dukungan pemerintah terhadap jaringan inovasi dan kemitraan antara sektor publik dan swasta menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah, bisnis, dan masyarakat sipil dalam mendorong inovasi. Pemerintah dapat memberikan dukungan finansial, fasilitas, atau insentif lainnya untuk mempromosikan kolaborasi dan pertukaran ide antara sektor-sektor tersebut. Dalam mengatasi *stunting*, Pemerintah Kabupaten Flores Timur dapat mendukung jaringan inovasi dan kemitraan antara sektor publik dan swasta dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan *stunting* dengan mengadopsi proses kolaboratif. Proses kolaboratif ini mencakup beberapa elemen kunci kepemimpinan fasilitatif seperti fasilitasi dialog antar pemangku kepentingan, membangun kepercayaan, komitmen dalam proses kolaborasi, mengembangkan dan menyatukan pemahaman yang sama hingga memotivasi untuk mencapai hasil.⁽¹⁹⁾ Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemerintah belum sepenuhnya melibatkan berbagai segmen aktor dalam proses kolaborasi. Dalam konteks ini, model kolaborasi ini menekankan perlunya keterlibatan semua

pemangku kepentingan. Oleh karena itu, penting untuk segera melibatkan pemangku kepentingan eksternal atau lebih luas guna mendukung peran pemerintah dalam mengatasi masalah *stunting*. Kolaborasi ini dapat melibatkan pemangku kepentingan seperti pengusaha, CSR, LSM, Akademisi dan masyarakat untuk bersama-sama merancang dan melaksanakan program-program yang efektif dalam mencegah dan mengatasi masalah *stunting*.

Pelaku Bisnis/Pengusaha (Business)

Pentingnya melibatkan sektor swasta, seperti pengusaha, menunjukkan bahwa upaya mengatasi *stunting* bukanlah tanggung jawab tunggal pemerintah melainkan merupakan kerjasama lintas sektor. Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dapat menciptakan solusi yang lebih holistik dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah *stunting*. Artinya intervensi *stunting* tidak hanya bersifat medis atau kesehatan semata, melainkan juga mencakup aspek-aspek sosial, ekonomi, dan bisnis dalam rangka meningkatkan gizi dan kesejahteraan anak-anak. Selain itu, dalam rangka mengurangi *stunting*, pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan status gizi dan kesehatan pekerja perempuannya melalui penyediaan hak dan fasilitas kesehatan. Hal ini akan berdampak positif secara langsung pada kesehatan bayi dan anak-anak, serta mendukung upaya pencegahan *stunting* secara lebih luas.

Temuan peneliti menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Flores Timur belum sepenuhnya melibatkan sektor swasta atau pelaku usaha dalam hal intervensi *stunting*. Padahal sektor usaha memiliki peran yang signifikan dalam menyediakan infrastruktur yang mungkin belum dapat dipenuhi sepenuhnya oleh pemerintah. Seperti mengalokasikan pendanaan untuk kegiatan *stunting* melalui aktivitas *corporate social responsibility*. Pengusaha dapat meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas sorgum dan telur puyuh di Kabupaten Flores Timur melalui investasi dalam pengembangan rantai pasok yang efisien. Ini melibatkan perbaikan infrastruktur transportasi, penyimpanan yang baik, dan distribusi terorganisir. Dengan membentuk kemitraan dengan petani lokal, pengusaha dapat meningkatkan produksi secara berkelanjutan dan memberdayakan

komunitas setempat. Sehingga bahan utama dalam PMT Terfokus Gerobak Cinta yakni sorgum dan telur puyuh mudah untuk didapatkan atau tersedia di semua wilayah di Kabupaten Flores Timur.

Masyarakat Madani (Civil Society)

Upaya pencegahan dan intervensi *stunting* tidak hanya bersifat medis tetapi juga melibatkan perubahan perilaku dan pemahaman masyarakat secara menyeluruh. Sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang *stunting*, mengurangi sikap acuh, dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah dan mengatasi *stunting*. Upaya ini melibatkan pendekatan komprehensif yang mencakup edukasi, pelayanan kesehatan, dan dukungan dari berbagai pihak. Masyarakat memiliki peran krusial dalam pencegahan dan penanganan *stunting* melalui meningkatkan kesadaran tentang penyebab dan dampaknya. Pemberdayaan perempuan, didukung oleh pendidikan dan pelatihan, menjadi relevan dalam konteks *stunting*, memungkinkan masyarakat membuat keputusan yang lebih baik terkait gizi dan kesehatan keluarga. Partisipasi aktif dalam program-program kesehatan, termasuk imunisasi, layanan kesehatan ibu dan anak, serta pelatihan gizi, juga menjadi peran masyarakat dalam mendukung upaya kesehatan. Selain itu, masyarakat dapat berkontribusi dengan menjaga sanitasi yang baik dan pengelolaan air bersih di tingkat rumah tangga dan masyarakat untuk mengurangi risiko infeksi dan penyakit yang dapat menyebabkan *stunting*.

Akademisi (Academician)

Secara esensial, peran akademisi dalam konsep kolaborasi *penta-helix* melibatkan pemberian wawasan dan melakukan analisis terhadap data empiris di lapangan melalui kegiatan penelitian, analisis, dan pengembangan sumber daya manusia. Meskipun kegiatan tridharma perguruan tinggi yang berhubungan dengan *stunting* sudah banyak dilakukan, namun penyebarannya masih terbatas pada jurnal dan pertemuan ilmiah, sehingga belum memiliki dampak signifikan dalam pengembangan kebijakan dan program berbasis nyata. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa kelompok aktor akademisi belum sepenuhnya terlibat dalam mengatasi persoalan *stunting* di wilayah Kabupaten

Flores Timur. Padahal potensi besar terletak pada kolaborasi antara dosen dan mahasiswa, yang dapat meningkatkan cakupan implementasi program, pemantauan, serta evaluasi dampaknya terhadap masyarakat. Sehingga kolaborasi bersama aktor akademisi menjadi penting guna mengoptimalkan penanganan *stunting*. Pemerintah Kabupaten Flores Timur perlu mendorong kolaborasi dalam penelitian bersama antara dosen dan mahasiswa untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab *stunting*, menganalisis efektivitas intervensi yang ada, dan mengembangkan solusi yang inovatif.

Media Massa (*Mass Media*)

Peran media sosial dalam intervensi *stunting* sangat penting karena platform-platform ini dapat menjadi alat efektif untuk menyebarkan informasi, meningkatkan kesadaran, dan memobilisasi partisipasi masyarakat. Media sosial menjadi saluran efektif untuk menyampaikan informasi edukatif tentang gizi, pola makan sehat, dan perawatan anak, dengan memanfaatkan konten visual seperti infografis dan video untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang *stunting*. Kampanye kesadaran di media sosial, melalui hashtag, tantangan, atau acara daring, dapat merangsang diskusi dan meningkatkan pemahaman urgensi *stunting*. Selain itu, media sosial juga berperan dalam mempromosikan perilaku hidup bersih dan sehat, termasuk praktik gizi yang baik, ASI eksklusif, dan pola makan seimbang.

Selain sebagai sumber informasi, media sosial juga berfungsi sebagai platform untuk memberikan dukungan psikososial, baik kepada orang tua yang memiliki anak *stunting* maupun individu yang membutuhkan informasi dan dukungan terkait masalah gizi. Dengan memanfaatkan media sosial secara efektif, intervensi *stunting* dapat mencapai audiens yang lebih luas, melibatkan masyarakat secara aktif, dan membangun kesadaran serta partisipasi dalam upaya pencegahan dan penanganan *stunting*. Pentingnya kolaborasi aktor media yang berkelanjutan menjadi penekanan terakhir, menunjukkan bahwa upaya pengentasan *stunting* membutuhkan keterlibatan berkesinambungan dari pihak media. Kolaborasi ini dapat memastikan informasi yang disajikan di media sosial tetap akurat,

relevan, dan memiliki dampak positif dalam mengatasi permasalahan *stunting*.

KESIMPULAN

Penerapan *collaborative governance* sebagai strategi inovatif dalam mengatasi *stunting* di Kabupaten Flores Timur memberikan gambaran komprehensif tentang upaya pencegahan dan penanggulangan *stunting*. Meskipun telah terjadi penurunan signifikan dalam angka *stunting* melalui program inovatif "Gerobak Cinta" tetapi terdapat beberapa tantangan seperti keterbatasan akses terhadap bahan pangan, rendahnya pemahaman masyarakat, minimnya partisipasi pemangku kepentingan, dan keterbatasan sarana prasarana serta SDM. Dalam menghadapi tantangan ini, *collaborative governance* dengan model *Penta Helix* muncul sebagai pendekatan yang efektif, melibatkan pemerintah (*government*), pengusaha (*business*), akademisi (*academician*), masyarakat madani (*civil society*) dan media massa (*mass media*) dalam pengambilan keputusan dan implementasi program pelayanan publik. Pendekatan ini menekankan perlunya kerjasama lintas sektor dan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan. Langkah-langkah konkret dari pemerintah, sektor swasta, masyarakat, akademisi, dan media massa diharapkan dapat bersinergi untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam mengatasi permasalahan *stunting*. Kesepakatan dan musyawarah antar pemangku kepentingan menjadi kunci untuk mencapai kesuksesan dalam mengatasi isu *stunting*. Dengan demikian, *collaborative governance* menjadi solusi inovatif yang dapat diterapkan secara luas dalam menanggulangi masalah kebijakan publik kompleks seperti *stunting*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada Dr. Maya Puspita Dewi, M.Si selaku Dosen Ilmu Administrasi, Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang telah memberikan kesempatan

penulis untuk melakukan penelitian tentang Collaborative Governance sebagai Strategi Inovatif dalam Mengatasi *Stunting* di Kabupaten Flores Timur. Penulis juga ucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah sangat membantu dalam menyelesaikan penelitian ini

DAFTAR PUSTAKA

1. Fesmia HL, Putri LL, Suryantini NKM, Nurhidayati N. Nutrisi Pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) Sebagai Dasar Perkembangan Kognitif: Sebuah Kajian Pustaka. 2023;12(3). Available from: <https://jku.unram.ac.id/index.php/jk/article/view/987/559>
2. Puspita L, Umar MY, Wardani PK. Pencegahan *Stunting* Melalui 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Ungu(ABDI KE UNGU) [Internet]. 2021;3(1):13–6. Available from: <https://journal.aisyahuniversity.ac.id/index.php/Abdi/article/view/stunting1000/stunting1000>
3. Saavedra JM, Dattilo AM. Nutrition in the First 1000 Days of Life: Society's Greatest Opportunity [Internet]. Early Nutrition and Long-Term Health. Elsevier Oxford; 2017. Available from: <http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-08-100168-4/00025-2>
4. Sasube LM, Luntungan AH. Asupan Gizi Pada 1000 Hari Pertama Kehidupan. J Ilmu dan Teknologi Pangan [Internet]. 2017;5(2):1–5. Available from: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/itp/article/download/19709/19292>
5. Williams AM, Suchdev PS. Assessing and Improving Childhood Nutrition and Growth Globally. *Pediatr Clin North Am* [Internet]. 2017;64(4):755–68. Available from: <http://dx.doi.org/10.1016/j.pcl.2017.03.001>
6. Ipan I, Purnamasari H, Priyanti E. Collaborative Governance dalam Penanganan *Stunting*. *Kinerja* [Internet]. 2021;18(3):383–91. Available from: <https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/KINERJA/article/view/9665/1489>
7. Laily LA, Indarjo S, Artikel I. Dampak *Stunting* terhadap Pertumbuhan dan Perkembangan. *Jurnal Higeia* [Internet]. 2023;7(3):354–64. Available from: <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/higeia/article/view/63544>
8. UNICEF, WHO WBG. Levels and Trends in Child Malnutrition [Internet]. Key findings. New York: UNICEF AND WHO; 2023. 1–31 p. Available from: <https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2023/05/JME-2023-Levels-and-trends-in-child-malnutrition.pdf>
9. Kemenkes RI. Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022. 2022;1–7.
10. Kabupaten Flores Timur. Data Prevalensi *Stunting* Tingkat Kabupaten Flores Timur. In Sekretariat Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Flores Timur; 2022.
11. Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur. Prevalensi *Stunting* Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 - 2023. 2023.
12. P2KBP3A Flores Timur. Prevalensi *Stunting* Kabupaten Flores Timur. 2023.
13. Kelen BANH, L. RTA, Nur ML. Implementasi Program Gerobak Cinta dalam Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* di Flores Timur. *Jurnal Ilmiah Kesehatan* [Internet]. 2023;18(2):121–34. Available from: <https://medika.respati.ac.id/index.php/Medika/article/view/925/pdf>
14. Kumanireng HYNL, Triputro RW. Gerobak Cinta: Model Pencegahan *Stunting* Di Kabupaten Flores Timur Nusa Tenggara Timur. *Journal of Indonesian Rural and Regional Government* [Internet]. 2021;5(2):203–20. Available from: <https://jurnal.apmd.ac.id/index.php/JIRREG/article/view/146/96>
15. Picauly I. Pengaruh Pelaksanaan Aksi Konvergensi *Stunting* Terhadap Cakupan Program Intervensi Gizi Sensitif Di Propinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Pangan Gizi dan Kesehatan* [Internet]. 2021;10(2):71–85. Available from:

- <https://pergizipanganntt.id/ejpazih/index.php/filejurnal/article/download/156/129/427>
16. Picauly I, Tira DS, Taco B, Kartini R, Tena B. Pendampingan 25 Indikator Percepatan Penurunan *Stunting* Di Kabupaten Flores Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Pengabdian pada Masyarakat Kepulauan Lahan Kering* [Internet]. 2022;3(1):32–43. Available from: <https://pergizipanganntt.id/ejpazih/index.php/jpmkelaker/article/view/149>
 17. UPTD Puskesmas Menanga. *Tantangan Intervensi Stunting*. 2023.
 18. Astuti RS, Warsono H, Rachim A. Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik [Internet]. *Collaborative Governance Dalam Perspektif Publik*. Semarang: Universitas Diponegoro Press; 2020. 1–164 p. Available from: [https://doc-pak.undip.ac.id/id/eprint/1143/1/collaborative_gov_\(revisi\)_5_7_20-converted-.pdf](https://doc-pak.undip.ac.id/id/eprint/1143/1/collaborative_gov_(revisi)_5_7_20-converted-.pdf)
 19. Ansell C, Gash A. Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory* [Internet]. 2008;18(4):543–71. Available from: <https://academic.oup.com/jpart/article/18/4/543/1090370>
 20. Taylor B, de Loë RC. Conceptualizations Of Local Knowledge In Collaborative Environmental Governance. *Geoforum* [Internet]. 2012;43(6):1207–17. Available from: <http://dx.doi.org/10.1016/j.geoforum.2012.03.007>
 21. Miles MB, Huberman MA, Saldana J. *Qualitative Data Analysis: a Methodes Sorcebook* [Internet]. 3rd ed. New York: Sage Publicatin, Inc New York; 2014. 1–389 p. Available from: <https://books.google.co.id/books?id=3CNrUbTu6CsC&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>
 22. Innes JE, Booher DE. Network Power in Collaborative Planning Publication Date. *J Plan Educ Res*. 2002;21:221–36.
 23. Calzada I. (Un)Plugging Smart Cities with Urban Transformations: Towards Multistakeholder City-Regional Complex Urbanity? *URBS, Revista de Estudios Urbanos y Ciencias Sociales Journal* [Internet]. 2016;6(2):25–45. Available from: <http://www2.ual.es/urbs/index.php/urbs>
 24. Lindmark A, Sturesson E, Nilsson-Roos M. Difficulties of collaboration for innovation - A study in the Öresund region. Lund University: School of Economics and Management [Internet]. 2009;1–236. Available from: <http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/1437850>
 25. Mulgan G. The Process of Social Innovation. *Innovations: Technology, Governance, Globalization*. 2006;1(2):145–62.
 26. Etzkowitz H, Leydesdorff L. The dynamics of innovation: From National Systems and “mode 2” to a Triple Helix of university-industry-government relations. *Res Policy*. 2000;29(2):109–23.
 27. Carayannis EG, Campbell DFJ. Triple helix, Quadruple helix and Quintuple helix and how do Knowledge, Innovation and the Environment relate to Each other? a proposed framework for a trans-disciplinary analysis of sustainable development and social ecology. *International Journal of Social Ecology and Sustainable Development*. 2010;1(1):41–69.
 28. Seigler D. Renewing Democracy by Engaging Citizens in Shared Governance. *Public Adm Rev* [Internet]. 2011;71(6):968–70. Available from: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1540-6210.2011.02452.x>